

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Peran perbankan dalam membangun ekonomi merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>2</sup> Dengan adanya lembaga penyalur dana yang disebut dengan bank maka pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan juga sebagai sarana guna menggerakkan roda perekonomian.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan sebagainya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,<sup>3</sup> menjadi dasar untuk menerapkan *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda. *Dual Banking* sistem itu adalah

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**, Bab 1 Pasal 1, Butir 2, 1998.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**, Bab II, Pasal 3, 1998.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan sebagainya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**, 1998.

sistem perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan syari'ah Islam.<sup>4</sup>

Bank konvensional merupakan bank yang mayoritas berkembang dan paling banyak beredar di Indonesia.<sup>5</sup> Bank umum yang mempunyai kegiatan pemberian jasa paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah Indonesia. Ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda (Barat).<sup>6</sup> Menurut kamus umum bahasa Indonesia, konvensional berarti "*menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan*".<sup>7</sup> Apa yang menjadi kebiasaan dalam bank konvensional adalah dengan diterapkannya metode bunga dalam sistem operasionalnya, karena metode bunga telah ada terlebih dahulu dan oleh karenanya telah menjadi suatu kebiasaan.

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, salah satu kegiatan operasional perbankan syariah yaitu dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan tersebut ditujukan guna membantu masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan usahanya. Pada undang-undang perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah<sup>8</sup> memberikan pengertian perihal pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk

---

<sup>4</sup>Widyaningsih, **Bank dan Asuransi Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>5</sup>Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 32.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 33.

<sup>7</sup>W.J.S Poerwadarmita, **Kamus Umum bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 522.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, 2008.

*mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewamenyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salam, Dan Istishna* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Bank syari'ah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang operasional dan produk-produknya sesuai dengan garis-garis syari'ah.<sup>10</sup> Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>11</sup> Selain itu juga didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba*<sup>12</sup>, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai

---

<sup>9</sup>Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU No.21 Tahun 2008, pasal 1 angka 25

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syari'ah dari teori ke Praktik**, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 30.

<sup>11</sup>Ascarya; Diana Yumanita, **Bank Syariah: Gambaran Umum**, seri kebanksentralan nomor 14, Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta:, 2005, hlm. 4.

<sup>12</sup>“Sistem Perbankan Syariah”, <<http://cafe-ekonomi.com>>, Oktober 2017

kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>13</sup>

Bank syari'ah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syari'ah Islam.<sup>14</sup> Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga akhirat nanti.<sup>15</sup>

Bank Syariah dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah menyalurkannya dengan berbagai macam cara, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan pada bank syariah menggunakan akad Murabahah. Menurut Ataul Haque, akad Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>16</sup> Dengan demikian dalam melaksanakan akad Murabahah, penjual berkewajiban untuk memberi tahu harga produk yang dibeli kemudian juga berkewajiban untuk menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya.

Jual-beli dengan menggunakan akad Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan

---

<sup>13</sup>“Perbankan Syariah”, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Oktober 2017

<sup>14</sup>Edi wibowo dan Untung Hendi Wido, **Mengapa Memilih Bank Syari'ah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 21.

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syari'ah dari teori ke Praktik**, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 29.

<sup>16</sup>Ataul Haque, **Reading in Islamic Banking**, Islamic Foundation, Dhaka, 1987, hlm. 143.

keuntungan yang disepakati.<sup>17</sup> Lebih lanjut dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.<sup>18</sup> Berdasarkan penjelasan diatas mengenai akad murabahah, jadi pada dasarnya pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan akad Murabahah merupakan sebuah akad dengan menggunakan sistem jual-beli barang dengan harga perolehan dan juga dengan tambahan keuntungan. Baik harga perolehan maupun perhitungan mengenai keuntungan merupakan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menjalankan usahanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beberapa peraturan tersebut memuat pengaturan perihal pelaksanaan kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah guna menjamin kesyariahan lembaga keuangan syariah tersebut. Peraturan-peraturan tersebut beberapa diantaranya terdapat peraturan yang mengatur secara umum dan khusus mengenai akad Murabahah. Akad Murabahah sendiri secara khusus diatur dalam

---

<sup>17</sup>Adiwarman A karim, **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat (1) huruf (d) dijelaskan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang *secara prinsip menjadi milik bank* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan selain harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>19</sup> Pada dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, prinsip kehati-hatian juga disebutkan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan atas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan atas prinsip kehati-hatian yang merupakan kewajiban setiap bank di indonesia baik pada bank konvensional maupun bank syariah, semuanya berkewajiban untuk menerapkannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga Bank syariah dalam

---

<sup>19</sup>Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2001, hlm. 18.

menjalankan kegiatan usahanya pada prakteknya, dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, bank syariah hanya bertindak sebagai “intermediator” antara nasabah dan penjual barang yang diinginkan nasabah (biasanya barang tersebut berupa properti). Bank syariah hanya menyalurkan pembiayaan untuk membantu nasabah membeli barang yang diinginkannya tanpa membeli barang tersebut atas nama bank sendiri melalui akad wakalah.

Dikarenakan ketika bank membeli barangnya sendiri bisa jadi barang yang telah dibeli oleh bank tidak cocok dengan keinginan nasabah, sehingga bank akan mengalami kerugian atas hal tersebut ketika nasabah menolak untuk membelinya. Oleh sebab itu atas dasar hal tersebut bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip kehati-hatian, supaya bank tidak mengalami kerugian dalam melakukan kegiatan pembiayaan menggunakan akad murabahah, maka akad murabahah dilaksanakan juga dengan akad wakalah atau yang biasa disebut dengan akad *murabahah bil wakalah*.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah akad murabahah dengan menggunakan akad wakalah dalam pelaksanaannya, yaitu dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah. Penerapan akad *murabahah bil wakalah* tersebut merupakan bentuk dari sifat bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh bank dengan menggunakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah, menyebabkan akad

murabahah yang dimaksud menjadi tidak murni murabahah seperti yang ada dalam syariat islam.

Akad wakalah selalu digunakan oleh lembaga keuangan syariah termasuk diantaranya oleh bank-bank syariah yang ada di Indonesia, namun penerapan akad wakalah pada setiap lembaga keuangan syariah termasuk bank memiliki penerapan dan tata cara yang berbeda-beda walaupun telah ada payung hukum yang mengaturnya. Seperti misalnya pada BMT<sup>20</sup> Anda Salatiga dalam prakteknya BMT pernah melakukan akad wakalah dan akad murabahah dalam waktu satu pintu.<sup>21</sup> Maksud dari satu pintu adalah dengan cara bersamaan, yaitu penandatanganan akad wakalah dan murabahah dilakukan secara bersamaan. Begitu pula pada Bank BRI Syariah, terkadang penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan.<sup>22</sup> Selanjutnya juga ada yang dilakukan sebelum penandatanganan akad murabahah yaitu seperti misalnya pada Bank BNI Syariah. Pada Bank BNI Syariah sebagai peralihan hak atas kepemilikan, akad wakalah diadakan terlebih dahulu beberapa saat atau hari sebelum diadakan akad murabahah atau jual beli.<sup>23</sup> Sehingga penerapan pada bank BNI Syariah penandatanganan akad wakalah dilakukan sebelum penandatanganan akad murabahah.

---

<sup>20</sup>Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpandu yang isinya berintikan bayt al-mal wa altamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

<sup>21</sup>Fitrotut Daiyah, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Multibarang (Studi Kasus Di Bmt Anda Salatiga)**, Skripsi, IAIN Salatiga, 2015, hlm. 113.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ibu Tanti Kepala Cabang Bank BRI Syariah Kepanjen, 2017.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Riswanto Branch Manager Kantor Cabang Malang Bank BNI Syariah, 2017.



Akad murabahah juga sering kali diterapkan dengan mendahului pemberian wakalah dan *dropping* dana pembelian barang, yaitu ketika dropping dana pembelian barang dilakukan setelah akad *murabahah* ditanda-tangani. Misalnya pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tentang akad yang sudah ditandatangani walau barang belum dimiliki atau belum dalam penguasaan oleh BMT.<sup>24</sup>

Hal tersebut dikarenakan peraturan yang mengatur mengenai akad murabahah seperti yang telah disebutkan diatas belum mengatur secara spesifik perihal tata cara pembiayaan menggunakan akad murabahah yang diwakilkan melalui nasabah dengan menggunakan perjanjian khusus akad wakalah. Penggunaan akad murabahah dan wakalah yang dilakukan secara bersamaan atau yang dapat disebut dengan penggunaan dua akad dalam satu transaksi masih diperdebatkan mengenai halal dan haramnya.

Dalam hal ini, dua akad dalam satu transaksi atau *two in one* merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).<sup>25</sup> Penggunaan dua akad dalam satu transaksi tersebut dapat dipersamakan dengan *baiataini fi biah*, yaitu dua transaksi jual beli dalam satu jual beli. *Baiataini fi biah* dalam hadis dijelaskan bahwa :

---

<sup>24</sup>Marlia Navitri, **Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Pembiayaan Murabahah Dan Wakalah (Studi Kasus Di Bmt Istiqomah Karangrejo Tulungagung)**, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015, hlm. 4.

<sup>25</sup>Adiwarman Karim, **Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 49.

“*Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli.*” (HR. Ahmad dan an-Nasa’i Hadis ini shahih menurut at-Trimidzi dan Ibn Hibban).<sup>26</sup>

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang akan membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.<sup>27</sup> Para fuqaha sepakat untuk memegang apa yang menjadi tuntunan hadist tersebut secara umum, namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam rinciannya, yakni bentuk mana yang dapat disebut *bai’atani fi bai’ah* dan yang tidak dapat disebut dengan *bai’atani fi bai’ah*.<sup>28</sup>

Menurut Imam Syafi’i terdapat dua penafsiran tentang *bai’atani fi bai’ah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli), yaitu pertama seorang berkata, “aku jual barangku kepada engkau dengan harga 1000 real secara tunai dan harga 2000 real secara berutang.” Kedua, bahwa seseorang berkata : “aku jual barangku ini kepadamu dengan syarat agar kamu jual pula barangmu kepadaku.”<sup>29</sup> Alasan pelanggaran pada transaksi pertama karena transaksi tersebut mengandung *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga, sedangkan alasan pelarangan kedua yaitu mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain, hal ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang

---

<sup>26</sup>Al-Asqalani, Ibnu Hajar, **Bulughul Maram**, Al-Hidayah, Surabaya, t.tp., hlm. 162.

<sup>27</sup>Ismail Nawawi, **Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 41.

<sup>28</sup>Ibnu Rusyd, **Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 3**, Ash-Shifa’, Semarang, 1990, hlm. 60.

<sup>29</sup>Imam Abi Muhammad Husayn Ibn Mas’ud Ibn Muhammad Ibn Al-Farra Al-Baghwy, **At- Tahdhib Fi Fiqh Al-Imamish Shafi’i**, Darul Kitab Al-Alamiyah, Beirut, 516 H, hlm.532.

diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya merupakan bentuk *eksploitasi* yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli.<sup>30</sup>

Hukum mengenai *baiataini fi bai'ah* masih diperdebatkan, oleh karenanya Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *baiataini fi bai'ah*, yakni sebagai berikut :<sup>31</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa *baiataini fi bai'ah* merupakan jual beli *fasid* karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan, dimana harga barang tidak tentu apakah dibayar tunai atau kredit. Jika harga barang tersebut ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi tersebut menjadi sah.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat berpendapat bahwa transaksi tersebut batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa *baiataini fi bai'ah* merupakan transaksi yang sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli yang memberi pilihan kepada pihak pembeli. Akan tetapi, *Towus* dan *Hakam* dan *Hamad* berpendapat bahwa *baiataini fi bai'ah* diperbolehkan apabila dalam transaksinya salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi ridha.<sup>32</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa* Ayat 29,

---

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, **Terjemahan Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu**, Gema Insani, Depok, 1432H/2011 M, hlm. 137.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Sekh Hasan a'yub, **Fiqh Muamalah al-Maliyati Fil Islami**, Darus Salami, Mesir, 1431 H/2010 M, hlm. 67.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”*<sup>33</sup>

Berdasarkan klarifikasi bahan hukum, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, berdasarkan wawancara beliau berpendapat bahwa akad dan transaksi memiliki status dan kedudukan yang saling menguatkan, sehingga dengan adanya dua akad dalam satu transaksi tersebut boleh saja dilakukan tetapi transaksi tersebut harus mengandung unsur kemaslahatan (terdapat manfaat),<sup>34</sup> namun dengan catatan bahwa perjanjian dua akad dalam satu transaksi ini diperbolehkan apabila sudah sesuai dengan pendapat dari para Ulama yang menyatakan bahwa multi akad dua akad dalam satu transaksi yang sifatnya berlawanan adalah haram yaitu jika menggabungkan akad tabarru dan akad tijarah.

Akad tabarru adalah akad yang memiliki arti segala macam perjanjian atau akad yang memiliki pengertian bersangkutan dengan transaksi yang tidak mengejar keuntungan (tidak bersifat komersil), sedangkan akad tijarah memiliki pengertian yaitu segala macam perjanjian atau akad mengenai transaksi yang bertujuan untuk mengejar keuntungan

<sup>33</sup> Al-Quran

<sup>34</sup> Refsa Nanda, **Hukum Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi**, 2016, <http://www.materikelas.com/hukum-penggunaan-dua-akad-dalam-satu-transaksi/#>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

semata yang bersifat komersil. Hal-hal secara lahiriah yang melarang dua akad dalam satu transaksi tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan transaksi ini dilarang jika disertai unsur keharaman. Jadi pada dasarnya menurut pendapat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Lampung yakni Drs. H. Mawardi As., menyatakan bahwa adanya praktik dua akad dalam satu transaksi tersebut diperbolehkan namun harus mengandung unsur kemaslahatan (manfaat),<sup>35</sup> juga menurut Hukum Islam berdasarkan dalil dari Imam Asyhab dan dari mazhab Maliki, pendapat Imam Taimiyah dari mazhab Hambali, dan pendapat Imam At-Tasuli.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian diatas terdapat banyak perdebatan dikalangan ulama mengenai diperbolehkan atau tidaknya menggunakan dua akad dalam satu transaksi berdasarkan syariat Islam. Di indonesia sendiri berdasarkan kepada hukum positif yang ada status dan kedudukan dari penggunaan dua akad dalam satu transaksi adalah belum ada pengaturannya, hal tersebut tidak ditemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi tidak ditemukan pengaturannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah Peraturan tersebut hanya mengatur perihal diperbolehkan atau

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

tidaknya penggunaan akad Murabahah dengan akad Wakalah namun tidak mengatur mengenai penggunaannya secara terperinci, seperti pada Peraturan Bank Indonesia Nomor :07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat (1) huruf (d) dijelaskan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang *secara prinsip menjadi milik bank*, selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah poin pertama angka (9) menyatakan bahwa jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang *secara prinsip, menjadi milik bank*.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Peraturan Bank Indonesia Nomor :07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah mengenai barang secara prinsip telah menjadi milik bank dijelaskan dalam penjelasan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah walaupun tidak secara detil mengenai apa yang dimaksud dengan

“...barang secara prinsip telah menjadi milik bank”.<sup>37</sup> Dalam penjelasan dari Pasal 9 Ayat (1) huruf (d) yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :07/46/PBI/2005 tersebut, yaitu yang dimaksud barang secara prinsip telah menjadi milik bank adalah “...dalam wakalah pada Akad Murabahah adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.”<sup>38</sup> Pengaturan mengenai akad murabahah dan akad wakalah hanya sebatas mengenai diperbolehkan atau tidaknya penggunaan akad wakalah dalam pelaksanaan akad murabahah, namun tidak ada pengaturan khusus yang terperinci yang mengatur mengenai pelaksanaan dua akad dalam satu transaksi, Sehingga pada prakteknya setiap lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah memiliki penafsiran tersendiri atas pasal tersebut, salah satunya adalah dengan dilakukannya penandatanganan akad murabahah dan akad wakalah yang dilakukan secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan munculnya potensi tidak sah berdasarkan hukum positif dan tidak syar’inya akad murabahah karena bertentangan dengan prinsip syariah yang nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu penerapan akad murabahah dengan akad wakalah atau yang biasa disebut dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* menarik untuk diteliti mengenai keabsahannya.

---

<sup>37</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor :07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>38</sup> *Ibid.*

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pembeda</b>
1.	Achmad Subchan  Universitas Negeri Semarang	Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank BCA Syariah (Studi Di Bank BCA Syariah Semarang)	2015	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Achmad Subchan adalah, penelitian yang dilakukan oleh Achmad adalah mengenai akibat atas penerapan akad wakalah pada akad murabahah yang digunakan oleh Bank BCA Syariah Semarang terkait dengan ke syariahan akad murabahah yang dilakukan pada Bank BCA Syariah Semarang Terkait dengan prinsip



				<p>syariah. Sedangkan penulis meneliti tentang akibat hukum atas penandatanganan akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> yang dilakukan secara bersamaan dalam jual beli pada bank syariah secara umum tidak terpaku hanya pada satu instansi. Penulis juga meneliti terkait dengan penyatuan akad wakalah dan murabahah dari sisi akibat hukumnya.</p>
2.	<p>Ita Dwi Lestari, S.H.I</p> <p>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Penanganan Pembiayaan Wakalah Wal Murābahah Bermasalah Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah</p>	2017	<p>Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Ita Dwi adalah, penelitian yang dilakukan oleh Ita Dwi meneliti tentang penanganan pembiayaan Wakalah Wal</p>

				<p>Murabahah yang bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan (BTPN) Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah, sedangkan penulis meneliti tentang penandatanganan akad Murabahah Bil Wakalah yang dilakukan secara bersamaan dari sisi akibat hukumnya.</p>
3.	<p>Masrudin Yusfi Albayani Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 2400/PDT.G/2013/P A JS)</p>	2017	<p>Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Masrudin adalah, penelitian yang dilakukan oleh Masrudin meneliti tentang sengketa ekonomi syariah yang bersumber dari perjanjian jual beli yang menggunakan akad pembiayaan Murabahah</p>

				<p>Bil Wakalah dengan Studi Putusan No. 2400/PDT.G/2013/PA JS sedangkan penulis meneliti tentang penandatanganan akad Murabahah Bil Wakalah yang dilakukan secara bersamaan dari sisi akibat hukumnya.</p>
4.	<p>Naufal Vidi Rashadi</p> <p>Universitas Brawijaya</p>	<p>Status Kepemilikan Objek Murabahah Dalam Akta Pembiayaan Murabahah (Analisis Akad Murabahah Perbankan Syariah)</p>	2017	<p>Pembeda penelitian yang akan dilakukan oleh Naufal dan penulis adalah, penelitian yang dilakukan oleh Naufal adalah meneliti mengenai status kepemilikan objek murabahah yang ada didalam akta pembiayaan Murabahah apakah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum</p>

				<p>positif yang ada.</p> <p>Sedangkan peneliti meneliti mengenai penulis meneliti tentang penandatanganan akad Murabahah Bil Wakalah yang dilakukan secara bersamaan dari sisi akibat hukumnya.</p>
--	--	--	--	---

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana implikasi yuridis penandatanganan akad murabahah bil wakalah secara bersamaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis penandatanganan akad murabahah bil wakalah secara bersamaan pada lembaga keuangan syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terkait dengan akibat hukum atas penandatanganan akad murabahah bil wakalah

secara bersamaan pada lembaga keuangan syariah. Sehingga peraturan mengenai hal tersebut dapat dikembangkan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Bank Syariah

Bagi Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan dapat menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur atas kegiatan usaha yang sedang dijalankannya terkait dengan akibat hukum atas penandatanganan akad murabahah bil wakalah secara bersamaan pada bank syariah.

### b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan salah satunya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan penelitian ini sebagai tolak ukur untuk mengkaji ulang peraturan yang ada dan membuat peraturan baru terkait dengan akad *Murabahah Bil Wakalah*.

### c. Bagi Bank Indonesia

Bagi Bank Indonesia guna menjalankan tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Penelitian ini dapat dijadikan oleh Bank Indonesia sebagai tolak ukur untuk mengkaji ulang peraturan yang ada dan membuat peraturan baru terkait dengan akad *Murabahah Bil Wakalah*.

d. Bagi Dewan Syariah Nasional

Bagi Dewan Syariah Nasional selaku pengawal ekonomi syariah di Indonesia yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa atas suatu peraturan yang berkaitan dengan prinsip syariah yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Sehingga nantinya Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai tolak ukur untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan akad *Murabahah Bil Wakalah*.

e. Bagi Dewan Pengawas Syariah

Bagi Dewan Pengawas Syariah selaku badan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah dan juga yang memiliki fungsi untuk mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi Dewan Pengawas Syariah untuk mengajukan usul kepada Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan fatwa mengenai akad *Murabahah Bil Wakalah*, seperti yang telah diketahui bahwa akad *Murabahah Bil Wakalah* sudah umum diterapkan di Indonesia dan belum memiliki peraturan khusus yang mengaturnya.

f. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perbaikan peraturan atas bank syariah khususnya mengenai penerapan akad murabahah bil wakalah pada bank syariah.

g. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya agar masyarakat mengetahui akibat hukum terkait dengan penerapan akad murabahah bil wakalah dalam perjanjian jual beli pada bank syariah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penelitian yang nantinya akan dipaparkan oleh peneliti, terdiri dari 5 (lima) bab serta beberapa sub bab yang terdapat didalamnya. Berikut sistematika penulisan penelitian secara lebih rinci :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Disamping itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai orisinalitas kepenulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika kepenulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, akan membahas mengenai kajian pustaka. Jadi, dalam bab II ini, akan dijelaskan mengenai ruang lingkup

permasalahan (*legal issue*) yang diangkat oleh peneliti secara umumnya saja jadi belum membahas permasalahannya (*legal issue*) secara lebih rinci.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini, akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti akan memaparkan mengenai jenis penelitian yang dibahas, pendekatan penelitian, jenis bahan hukumnya, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini, peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang diangkat dari sisi hukum melalui analisis secara normatif, yang nantinya akan mengeluarkan gagasan hukum dari penelitian yang peneliti bahas.

### BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini, berisi kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang penulis buat.



